

STUDI LITERATUR PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT

COMMUNITY BASED MARITIME TOURISM DEVELOPMENT LITERATURE STUDY

Anis Munandar^{1*}, Rudi Febriamansyah², Erwin³, Melinda Noer⁴

^{1*} Program Studi Doktor Studi Pembangunan Pascasarjana Unand

Email: anismunandar75@gmail.com

^{2,3,4} Program Studi Doktor Studi Pembangunan Pascasarjana Unand

ABSTRAK: Sebagai daerah kepulauan, Indonesia memiliki banyak potensi wisata bahari. Pengembangannya dapat membantu pertumbuhan ekonomi Negara maupun masyarakat. Untuk mengembangkan wisata bahari dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui pendekatan *bottom-up* yaitu berbasis masyarakat. Agar proposisi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya secara teoritis, maka dibutuhkan studi literatur tentang pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat dan ini sekaligus menjadi tujuan dari penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber terutama jurnal ilmiah yang didapatkan dari website jurnal ilmiah (nasional dan internasional), *Open Jurnal Acses*, dan *Google Scholar*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Fokus data pada kajian ini yaitu studi literatur tentang gambaran umum wisata bahari Indonesia dan literasi konseptual teoritis serta penelitian terdahulu tentang pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat dan teori atau konsep terkait dengan pembangunan/pengembangan berbasis masyarakat. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui alat analisisnya yaitu analisis isi. Banyak potensi dan destinasi pariwisata bahari yang tersebar diseluruh wilayah administratif Indonesia. Sumberdaya pariwisata bahari Indonesia yang sudah mendunia seperti keragaman hayati terumbu karang, spot *snorkeling*, spot *dive*, dan spot *surfing*. Untuk mengembangkan pariwisata bahari tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kearifan lokal, budaya, adat istiadat, religi. Pendekatan tersebut lebih dikenal dengan pembangunan/pengembangan berbasis masyarakat. Dalam implementasinya dibutuhkan strategi jitu dan perencanaan yang baik agar tujuan pengembangan pariwisata bahari dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, pesisir pantai, pulau-pulau, wisata bahari

ABSTRACT: As an archipelago, Indonesia has a lot of marine tourism potential. Its development can help the economic growth of the State and society. To develop maritime tourism can be done with a variety of approaches, one of them through a bottom-up approach that is community based. So that the proposition can be proven theoretically correct, it is necessary to study literature about the development of community-based marine tourism and this is at the same time the goal of research. This research belongs to the type of library research. The data used are secondary data from various sources, especially scientific journals obtained from scientific journal websites (national and international), *Open Journal of Access*, and *Google Scholar*. Data collection techniques used are documentation techniques. The focus of the data in this study is the study of literature on the general description of Indonesian marine tourism and theoretical conceptual literacy as well as previous research on community-based marine tourism development and theories or concepts related to community-based development / development. The data analysis technique used is descriptive qualitative through analysis tools, namely content analysis. Many marine tourism potentials and destinations are scattered throughout the administrative regions of Indonesia. Indonesian marine tourism resources that are worldwide, such as biodiversity of coral reefs, snorkeling spots, dive spots, and surfing spots. To develop maritime tourism can be done by optimizing the potential of the community, such as local wisdom, culture, customs, religion. This approach is better known as community-based development / development. In its implementation, it

needs accurate strategy and good planning so that the goal of developing marine tourism can be achieved well.

Keywords: *economic growth, coastline, islands, marine tourism*

A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki peran dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Ahmar *et al*, 2012; Novitri *et al*, 2017). Pariwisata di daerah juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat terlihat dari terbukanya lapangan kerja, bertambahnya pendapatan masyarakat disekitar lokasi wisata (Remi *et al*, 2017).

Pariwisata merupakan suatu rangkaian aktivitas kepergian sementara seseorang atau lebih menuju tempat lain yang berada diluar mereka berdomisili (Suwanto, 2004). Salah satu pariwisata yang populer dikalangan wisatawan adalah pariwisata bahari. Pariwisata bahari (*marine tourism*) meliputi hal-hal yang terkait dengan kegiatan wisata, *pleisure* dan rekreasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan perairan laut (Hall 2001, dalam Adrianto 2006). Melihat potensi pariwisata bahari yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, pemerintah menjadikan pariwisata bahari sebagai salah satu fokus yang perlu dikembangkan (Kemenparekraf, 2020).

Untuk dapat mengembangkan pariwisata bahari, dibutuhkan dukungan dan strategi yang matang seperti keberpihakan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran dana dari pemerintah. Tidak hanya itu saja, masih ada hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk terwujudnya pengembangan pariwisata bahari lebih baik, serti model, pola, dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya, kondisi geografis lokasi pariwisata bahari yang dikembangkan. Selain itu, paradigma pembangunan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah Indonesia telah banyak mengarah kependekatan partisipatif, sehingga muncul berbagai model pengembangan pariwisata yang menitik beratkan pada partisipasi atau keterlibatan masyarakat.

Akhir-akhir ini salah satu model pengembangan pariwisata bahari yang digunakan adalah dengan menggunakan masyarakat sebagai basis pengembangannya. Dalam hal ini masyarakat diberikan ruang dan kesempatan terlibat dalam proses pengembangan pariwisata bahari. Keterlibatan masyarakat dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan program serta kegiatan pengembangan pariwisata bahari (Sero, 2012). Dalam pelaksanaannya, pengembangan pariwisata bahari membutuhkan keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik dilakukan oleh pelaku pengembangan dengan masyarakat (Salim dan Burbani, 2012).

Pada prinsipnya, pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat merupakan aplikasi dari teori pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber-daya yang dapat diakses oleh masyarakat setempat (Aprilia *et al*, 2014). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata bahari tidak hanya mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan wisatawan, namun juga mesti memperhatikan keinginan dan kemampuan masyarakat tempatan.

Namun demikian, besarnya peluang untuk memanfaatkan sumberdaya masyarakat sebagai basis dalam pengembangan pariwisata bahari tidak sebanding dengan jumlah penelitian terdahulu terkait dengan isu tersebut. Dalam hal ini membuktikan bahwa, pendekatan pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat belum banyak dihasilkan oleh peneliti terdahulu.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk menghasilkan sebuah inovasi yang bersifat konseptual teoritis, ide pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat membutuhkan landasan teoritis yang kokoh. Sehingga nantinya, solusi yang bersifat konseptual teoritis dapat dipertanggungjawabkan dan dipertahankan dalam tataran dunia teoritis. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah studi literatur tentang pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat.

Penelitian ini nantinya dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang studi pembangunan yang diaplikasikan pada sektor pariwisata. Pada tataran praktis, penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis yang digunakan dalam menghasilkan konsep pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat.

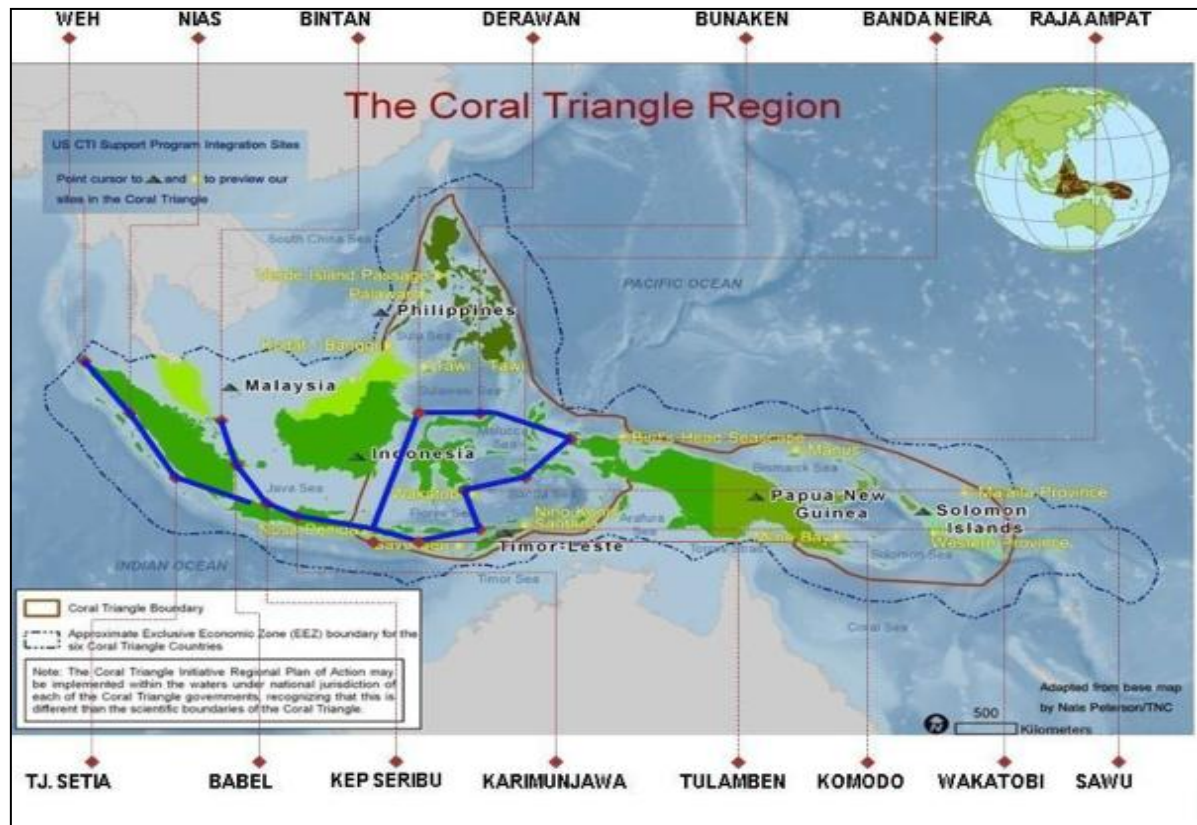
B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber terutama jurnal ilmiah yang didapatkan dari website jurnal ilmiah (nasional dan internasional), *Open Jurnal Acses*, dan *Google Scholar*. Khusus untuk data penelitian terdahulu dibatasi tahun terbitnya yaitu 10 tahun belakangan atau terbitan tahun 2010-2020, sedangkan data yang berasal dari buku teks atau buku literatur tidak dilakukan pembatasan tahun terbitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Fokus studi ini pada literasi terhadap penelitian terdahulu tentang pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat dan teori atau konsep terkait dengan pembangunan/pengembangan berbasis masyarakat. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui alat analisisnya yaitu analisis isi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Pariwisata Bahari Indonesia

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 18.000 km dan luas lautnya sekitar 3,1 juta km² (Kementerian Pariwisata, 2018). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang layak dikembangkan sebagai sumber devisa Negara. Salah satu potensi sumberdaya hayati yang dapat menunjang pengembangan pariwisata bahari adalah terumbu karang. Data menunjukkan bahwa potensi terumbu karang Indonesia tersebar diseluruh wilayah sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Peta Sebaran Terumbu Karang di Indonesia (Sumber: Kementerian Pariwisata, 2018)

Gambar di atas menunjukkan bahwa sumberdaya hayati yang terdapat dilautan Indonesia sangat menunjang salah satu aktivitas wisata bahari diantaranya *diving* yang merupakan kegiatan menyelam di bawah laut untuk melihat keindahan bawah laut atau kegiatan *snorkeling* yaitu kegiatan berenang di permukaan air laut dan melihat keindahan yang ada dibawahnya.

Pada kenyataannya, *spot dive* tersebar diseluruh wilayah administratif Indonesia. Data menyebutkan sekurang-kurangnya ada 33 titik *spot dive* yang dimiliki oleh Indonesia. Ke-33 titik tersebut tersebar dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Pada kenyataannya memang spot terbanyak berada di wilayah Pulau Sulawesi dan Maluku, Namun beberapa titi dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua. Melalui Gambar 2 berikut ini dapat terlihat sebaran *spot dive* Indonesia.



Gambar 2. Peta Sebaran *Spot Dive* Seluruh Indonesia (Sumber: *Scuba Diving* Surabaya, 2011)

Selain kedua potensi di atas, masih ada potensi lainnya yang dapat mendukung pengembangan pariwisata bahari, seperti kegiatan olah raga *surfing* yang sangat diminati oleh para wisatawan manca Negara. Adapun spot *surfing* yang laing mendunia dimiliki Indonesia berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini memiliki banyak titik *spot surfing* yang diminati oleh wisatawan mancanegara, sebagai mana yang terlihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Sebaran Spot Surfing Kabupaten Kepulauan Mentawai, Indonesia (Sumber: GPS Wisata Indonesia, 2018).

2. *Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat “Pembelajaran dari Konseptual Teoritis dan Penelitian Terdahulu”*

Pada prinsipnya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti luas (Kartasasmita, 1997). Dalam pelaksanaannya, pembangunan tidak hanya didominasi oleh pemerintah, namun juga ada pelaku lainnya seperti pihak swasta dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan tersebut. Seluruh pelaku pembangunan saling bersinergi disetiap tahapannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring untuk mewujudkan tujuan pembangunan (Mardikanto & Soebiato, 2013).

Seiring berkembangnya paradigma dan pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan yang timbul akibat ketidak puasan dari hasil pengaplikasian teori pembangunan di Negara-negara berkembang, Korten (1984) dalam Theresia *et al* (2015) melahirkan teori baru untuk menjawab ketidak puasan tersebut yaitu pembangunan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*). Umunya orang memposisikan teori ini sebagai *alternative development theory*. Teori tersebut menyatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan mesti berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, tidak pada berbasis pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar. Pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki (Theresia *et al*, 2015).

Adapun pencirian dari pembangunan berbasis masyarakat adalah: 1) Pengambilan keputusan pada setiap tahapannya diserahkan kepada masyarakat; 2) Terfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola serta memobilisasi sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya; 3) Bersifat fleksibel sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki; 4) Dalam pelaksanaannya bersifat kolaborasi antara birokrasi dengan masyarakat; 5) Adanya proses pembentukan jaringan (Moeljarto Tjokrowinoto dalam Theresia *et al*, 2015). Dalam perkembangannya, pembangunan berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan basis-basis sumberdaya sosial kemasyarakatan yang dimiliki di lokasi pembangunan tersebut, seperti pembangunan berbasis sumberdaya lokal, berbasis modal sosial, berbasis kebudayaan, berbasis kearifan lokal, dan berbasis spritual (Theresia *et al*, 2015).

Teori di atas tentunya dapat diaplikasikan pada beberapa sektor pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang diklaim oleh pemerintah, salah satu sektor penyumbang devisa Negara terbanyak adalah sektor pariwisata (Kementerian Pariwisata, 2018). Dalam hal pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata khususnya pariwisata bahari sebagai andalan di Indonesia, dapat juga dilakukan dengan mengadopsi teori pembangunan berbasis masyarakat. Terbukti dari hasil penelitian Sero (2012), bahwasanya di Kabupaten Almahera Utara telah mengaplikasikan model pengembangan pariwisata bahari di Pantai Tagalaya berbasis masyarakat. Temuannya di lokasi penelitian adalah adanya partisipasi masyarakat dan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata bahari, selain itu ditemukan juga dampak positifnya yaitu terbuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar kawasan wisata bahari yang telah dikembangkan. Selain itu, Salim dan Purbani (2015) menemukan bahwa pengembangan pariwisata bahari yang dilakukan di Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Penelitian menemukan tiga variabel utama yang harus dititikberatkan dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Kaledupa dan sekitarnya, yaitu informatif, koordinasi antar instansi, dan sumberdaya alam. Menurut temuan dari penelitian Tamaritaka & Rosyidie (2017) pengembangan pariwisata dilingkungan pantai dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kearifan lokal yang mencirikan hubungan selaras dengan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.

Tentunya banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pengembangan pariwisata bahari tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satryanto dan Pamungkas (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata yaitu; (a) Faktor Belum Optimalnya Potensi Obyek Daya Tarik Kawasan Wisata Bahari; (b) Faktor Keterbatasan Aksesibilitas untuk

Menjangkau Kawasan Wisata Bahari; (c) Faktor Keterbatasan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Kawasan Wisata Bahari ; (d) Faktor Dukungan Kegiatan Masyarakat di Kawasan Wisata Bahari; (e) Faktor Menurunnya jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kawasan Wisata Bahari; (f) Faktor Dukungan Kebijakan (g) Faktor Ancaman Bencana alam. Selain faktor-faktor yang diungkapkan tersebut, temuan dari Indah dan Susetyo (2017) mengungkapkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata bahari, seperti dukungan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan objek daya tarik wisata bahari yang ada dilokasi wisata tersebut.

Supaya keseluruhan faktor di atas dapat teratasi dengan baik, dibutuhkan tindakan perencanaan dalam pengembangan pariwisata bahari. Pada kenyataannya, kegiatan perencanaan pengembangan pariwisata bahari bukanlah sesuatu hal yang baru. Umumnya stakeholder yang bertugas dalam merumuskan perencanaan pengembangan pariwisata bahari adalah pemerintah, seperti yang dilakukannya dalam pengembangan Pulau Salomon sebagai destinasi wisata bahari (Amalyah *et al*, 2016). Sebagai contoh pengembangan wisata pantai di Panganandaran. Dalam pelaksanaannya, dirumuskan terlebih dahulu perencanaan dan strategi pengembangan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pengembangan wisata bahari di Pangandaran (Hidayat, 2011). Begitu juga dengan yang dilakukan di pesisir pantai teluk Lampung, pengembangan wisata baharinya dilakukan dengan mengikuti perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk membantu tercapainya keefektifan dalam pengembangan pariwisata bahari (Abdilah, 2016).

Agar pengembangan wisata bahari dapat tercapai dengan maksimal, dibutuhkan strategi yang aplikatif dan solutif. Menurut Fretess *at al* (2013) untuk mengembangkan wisata bahari perlu dilakukan pengembangan produk (*productdevelopment*) yang merupakan strategi meningkatkan pengembangan produk pariwisata untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki. Dalam melakukan pengembangannya juga perlu diperhatikan kriteria ekologi, sosial ekonomi, dan faktor penunjang, kelembagaan dan sarana wilayah (Muis, Sumarni & Astina, 2016). Pengembangan wisata hendaknya dapat diselaraskan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta tidak berbenturan dengan upaya konservasi, melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah secara optimal dalam setiap proses-proses, dan peningkatan kerjasama perlu untuk ditingkatkan dengan institusi atau lembaga terkait, seperti agen perjalanan dan unit aktivitas mahasiswa pecinta alam (Satria, 2009).

Untuk mengaplikasikan pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat dibutuhkan strategi-strategi yang jitu guna tercapainya tujuan secara maksimal. Adapun strategi yang dapat dilakukan, diantaranya (Resnawaty, 2016):

1. Mendefenisian kebutuhan dan pengkondisian kebutuhan masyarakat
2. Pengembangan jaringan kreatif dan kooperatif antara aktor dalam pengelolaan wisata
3. Keterlibatan praktisi dalam pengembangan kawasan wisata

Selain strategi di atas, Talali dan Lasabuda (2018) menawarkan pengabdopsian empat pilar strategi pengembangan pariwisata Nasional, yaitu dengan memfokuskan dan mengoptimalkan: 1) Destinasi Pariwisata; 2) Industri Pariwisata, 3) Pemasaran Pariwisata; 4) Kelembagaan Pariwisata. Selanjutnya Djou (2013) mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata, pemerintah mesti mengembangkan strategi manajemen pengelolaan, perencanaan dan mempersiapkan sumberdaya manusia yang mumpuni.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian literatur, terlihat bahwasanya pemerintah Indonesia menyadari sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa untuk Negara Indonesia. Melihat potensi tersebut, pemerintah memasukkan sektor ini kedalam program pembangunan/pengembangan ekonomi Negara yang berada pada sektor pariwisata. Dalam melaksanakan pengembangan pariwisata bahari, sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya menjadikan masyarakat sebagai basis dalam pengembangan pariwisata bahari. Pendekatan dengan berbasis masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pengembangan wisata bahari sesuai dengan kondisi masyarakat lokal dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kegiatan pengembangan pariwisata bahari

berbasis masyarakat telah dilakukan pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Provinsi Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat dibutuhkan strategi jitu dan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kearifan lokal, budaya, adat istiadat, religi. Selain itu juga dibutuhkan perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, D. (2016). Pengembangan Wisata Bahari di Pesisir Pantai Teluk Lampung. Jurnal Destinasi Kepariwisata Indonesia, Vol.1, No.1, Hal.45-65.
- Ahmar., Nurlida., Muhani, M. (2012). Peran Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Jurnal Equilibrium, Vol. 2, No.1, hal 113-121.
- Amalyah, R., Hamid, D., Hakim, L. (2016). Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Salomon Sebagai Destinasi Wisata Bahari. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.37, No.1, Hal. 158-163.
- Aprilia, T. *et al.* (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi pratisi, akademis, dan pemerhati pengembangan masyarakat. Alfabeta. Bandung.
- Djou, G.A.J. (2013). Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende. Kawistara, Vol. 3, No.1, Hal. 12-23.
- DPS Wisata Indonesia. (2018). Tempat Surfing Terbaik di Indonesia. Diakses pada <https://gpswisataindonesia.info> tanggal 9 Juni 2020.
- Hidayat, M. 2011. Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal, Vol. I, No. 1. Hal. 33-44.
- Indah, D.N & Susetyo, C. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari di Gili Labak, Kabupaten Sumenep. Jurnal Teknik ITS, Vol. 6, No.1, Hal. C-75 sd C-77.
- Kartasasmita, G. (1997). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Makalah Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk.I Jawa Timur, 14 Maret 1997. Surabaya.
- Kemenparekraf. (2020). Rencana Teknokratis Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jakarta.
- Mardikanto, T & Soebiato, P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Muis, A.A., Sumarmi., Astina, K.I. 2016. Strategi Pengembangan Ekowisata Bahari Sebagai Sumber Belajar Geografi Pariwisata. Jurnal Pendidikan, Vol. 1, No. 11. Hal. 2178-2188.
- Novitri, Q., Junaidi., Syafri, M. (2017). Determinan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 3.
- Remi, S.S., Waluyo, D.S., Muljarijadi, B. (2017). *The Role of Tourism in The Development of Regional Economy: Case Study of The Special Capital Region of Jakarta Province*. AFEBI Economic and Finance Review (AEFR), Vol.02 No.01.
- Resnawaty, R. (2016). Strategi Community Practice Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Share Social Work Journal, Vol.6, No.1.

- Salim, L.H dan Purbani, D. (2015). Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat Di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (*Community Based Marine Tourism Development in Kaledupa Island, Wakatobi Regency, South East Sulawesi Province*). Jurnal Manusia dan Lingkungan, Volume 22, Nomor 3, Hal.380-387.
- Satryanto, R dan Pamungkas, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Lhok Geulumpang, Aceh Jaya. Jurnal Teknik ITS, Vol. 4, No.1, Hal. C-6 sd C-10.
- Satria, D. 2009. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang. Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 1, Hal. 37-47.
- Scuba Diving Surabaya. (2011). Peta Dive Spot Seluruh Indonesia. Diakses pada <http://www.scubadivingsurabaya.com> tanggal 9 Juni 2020.
- Sero, A. (2012). Model Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 4, Nomor 1, Hal. 72-84.
- Suwantoro, Gamal. (2004). Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Talali, A.A & Lasabuda, R. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir Di Desa Bentung Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (*Coastal Tourism Development Strategy in The Bentung Village, Sangihe Islands Regency of North Sulawesi*). Jurnal Kebijakan Sosek KP, Vol. 8, No.1, hal. 53-62.
- Tamaritaka, F & Rosyidie, A. (2017). Inkorporasi Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Lingkungan Pantai (*The Incorporation Of Local Wisdom In The Development Of Tourism Areas On The Beach Environment*). Jurnal Sosioteknologi, Vol. 16, No.1, Hal. 125-133.
- Teheresia, A., Andini, S.K., Nugraha, P.G.P., Mardikanto, T. (2015). Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Sebagai Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Alfabeta. Bandung.